

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KOTA BLITAR
JI. JAWA 64 C KOTA BLITAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahNya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2020 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Jukni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LkjIP sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good government*). Dengan acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD 2016-2021 Kota Blitar.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih belum sempurna, menyadari keterbatasan yang ada maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 9 Februari 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



ARIANTO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- f. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021) adalah :

**“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera
Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada pada :

Misi ketiga : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
			Meningkatnya pengawasan Perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN ADMINISTRASI UMUM

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

URUSAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PASAR

4. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
5. Program Pengembangan Pasar Tradisional
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan

URUSAN PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

7. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian
11. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 3 sasaran strategis/ kinerja utama, yaitu :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar - 36,3 %, sehingga persentase capaiannya sebesar -2.520 % dengan kategori tidak berhasil, yang berasal dari perhitungan target 1,5 % dengan realisasi sebesar -36,3 %. Menurunnya volume usaha perdagangan tahun ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19

II. Meningkatnya Pengawasan Perdagangan

dari hasil perhitungan, persentase peningkatan pengawasan perdagangan sebesar 4,78 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 95,6 % dengan kategori sangat berhasil, yang berasal dari perhitungan target 5 % dengan realisasi sebesar 4,78 %.

III. Meningkatnya Produktivitas Industri

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan nilai produksi industri sebesar -4,19 %, sehingga persentase capaiannya sebesar -1.147,5 % dengan

kategori tidak berhasil, yang berasal dari perhitungan target 0,4 % dengan realisasi sebesar -4,19 %.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor perdagangan dan industri telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya. namun tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tanpa terkecuali Indonesia dan khususnya Kota Blitar, yang mempengaruhi seluruh lini perekonomian.
- b. Belum tersedianya tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum.
- c. Semakin berkembangnya perdagangan mikro di Kota Blitar khususnya Pedagang Kaki Lima yang berdasarkan Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2018, ada 43 ruas jalan yang diperbolehkan untuk berjualan, kedepannya perlu dikaji apakah dibutuhkan penambahan ruas jalan, atau ruas jalan yang diperbolehkan sekarang masih layak untuk dijadikan tempat usaha perdagangan.
- d. Semakin mudah dan murah nya ongkos kirim barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia, membuat persaingan perdagangan semakin kompetitif dan berdampak terhadap pelaku usaha di Kota Blitar
- e. Lemahnya validasi data gudang yang ada di Kota Blitar
- f. Belum maksimalnya pembangunan Pasar Legi
- g. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri, karena terkendala cap tanda tera yang baru keluar akhir tahun 2020 dan alat standard yang perlu dikalibrasi agar pelayanan sah dilakukan menurut aturan.
- h. Di Kemetrolagian, dibutuhkan penambahan Ruang Lingkup khususnya untuk Timbangan Jembatan
- i. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi
- j. Pelaku IKM masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- a. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum

- b. Melakukan kajian tentang ruas jalan dan luas usaha perdagangan yang diperbolehkan di Kota Blitar
- c. Mengadakan pembinaan ekspor impor bagi pelaku usaha perdagangan
- d. Digitalisasi pendataan gudang
- e. Pembangunan pasar Legi tahap ke-2
- f. Penganggaran kalibrasi alat standard di Tahun 2021
- g. Pengadaan alat standard bidur untuk memenuhi syarat penambahan ruang lingkup dan pengikutsertaan penera dalam Diklat Teknis Timbangan Jembatan sebagai syarat pelayanan tera.
- h. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri
- i. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam even pameran/ promosi produk

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. DASAR HUKUM	5
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	5
F. ISU-ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	11
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020	16
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 – 2020	22
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	23
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	24
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	26
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	26
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	28
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	28
BAB IV PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. LANGKAH PERBAIKAN	29
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 (terbaru)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2020	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mempunyai tugas Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2020, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2016-2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Blitar.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKjIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka LKjIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Karena LKjIP tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

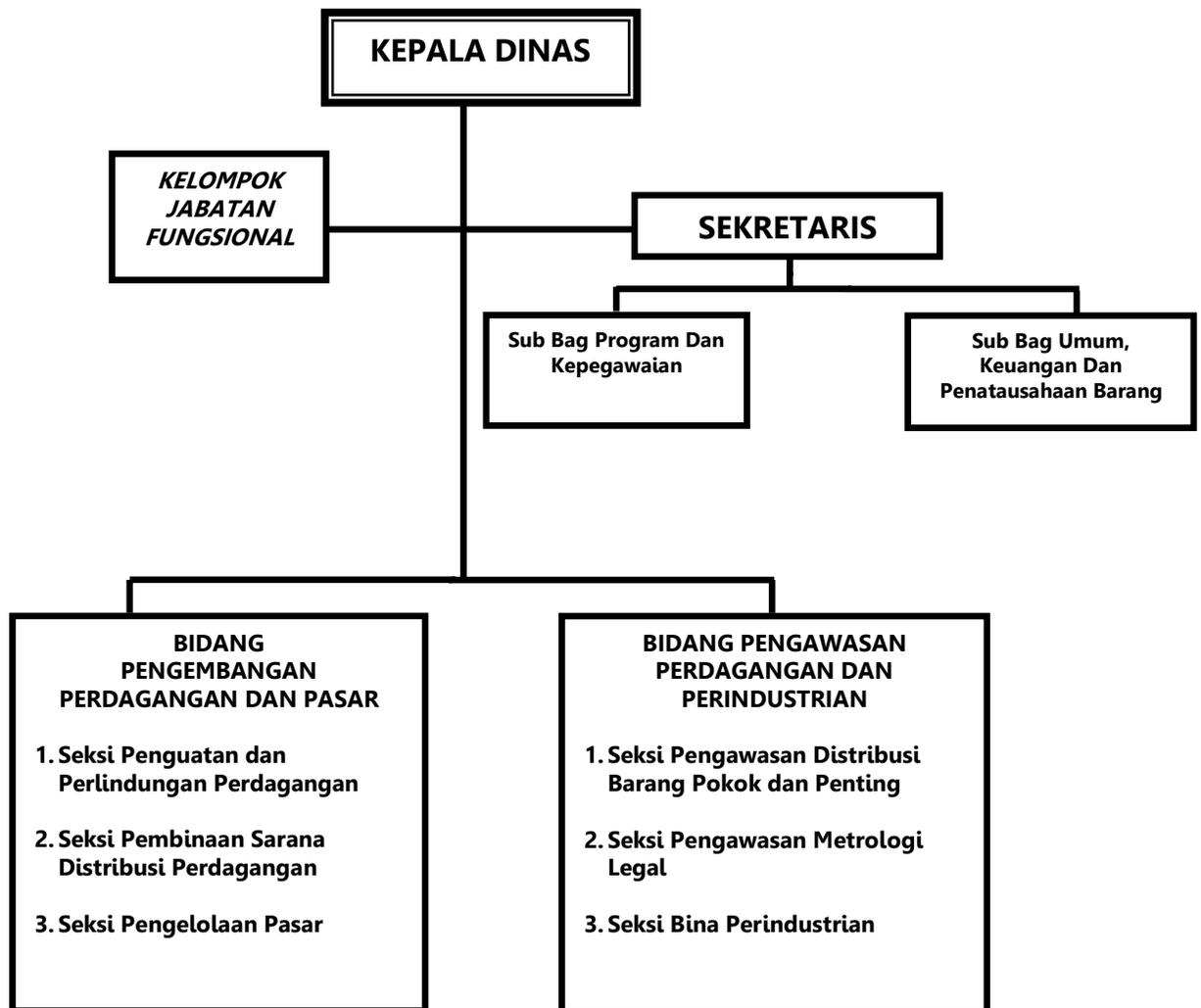
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- o. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- p. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- r. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- s. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- t. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- u. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- x. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- y. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- aa. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR



C. MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar selama tahun 2020.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2020, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021
8. Perda Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek- aspek strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar :

1. Kota Blitar mempunyai 9 pasar tradisional yang dapat dimaksimalkan sebagai pusat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di Kota Blitar dan sekitarnya
2. Kota Blitar sebagai pusat perdagangan dan jasa
3. Banyaknya potensi industri kecil yang dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih besar

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar antara lain :

1. Rendahnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan
2. Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku
3. Belum maksimalnya kegiatan dan pelayanan unit metrologi legal
4. Masih adanya pedagang minol ilegal di Kota Blitar
5. Kapasitas pelaku usaha industri masih rendah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021) adalah :

**“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera
Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada pada:

Misi ketiga : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
			Meningkatnya pengawasan Perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN ADMINISTRASI UMUM

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

URUSAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PASAR

4. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
5. Program Pengembangan Pasar Tradisional
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan

URUSAN PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

7. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian
11. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2. Rencana Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM
1	2		3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	$\{(Volume\ usaha\ perdagangan\ tahun\ n - Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)) / Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	1,5	%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan • Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan • Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	$\{(Jumlah\ pedagang\ yang\ diawasi\ (UTTP,\ BDKT,\ Minol\ dan\ Rokok\ Ilegal)\ tahun\ n - Jumlah\ pedagang\ yang\ diawasi\ (UTTP,\ BDKT,\ Minol\ dan\ Rokok\ Ilegal)\ tahun\ (n-1)\} / Jumlah\ pedagang\ yang\ diawasi\ (UTTP,\ BDKT,\ Minol\ dan\ Rokok\ Ilegal)\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	5	%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan • Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	$\{(Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ n - Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)) / Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	0,4	%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian • Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran, yang terdiri dari :
 - Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020
 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2020
 - Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra
 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)
2. Akuntabilitas Keuangan, yang terdiri dari :
 - Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3. Prestasi/ Penghargaan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Pengukuran kinerja berisi sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020

Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	%	1,5	-36.3	-2.520
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	%	5	4.78	95.6
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	%	0,4	-4.19	-1.147,5

Tabel. III.3. Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100	100	100
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	46	46	100
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	13	13	100
		Jumlah lembar penggandaan	lembar	44.000	53.600	122
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	2	2	100
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1.000	1.360	100
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	porsi	200	200	100
		Jumlah paket makanan khas daerah yang tersedia	macam	4	4	100
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	30	30	100
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	orang	50	50	100
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	108	108	100
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	16	16	100
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	komponen	8	8	100
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	25	25	100
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	2	2	100
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	macam	5	5	100
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	3	3	100
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	3	11	367
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	1	1	100
		Jumlah mebeulair yang terpelihara	macam	2	2	100
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	dokumen	4	4	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	dokumen	3	3	72
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	%	100	100	100
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah Event daerah dan Hari Besar Nasional yang diikuti	even	1	1	100
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	publikasi	14	14	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	dokumen	9	9	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	%	5	4,44	85
10	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	unit usaha	100	100	100
		Jumlah PKL yang didata	unit usaha	500	750	150
11	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	pedagang	300	300	100
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	unit usaha	2.000	1.866	93,3
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	%	65	67	103
12	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	unit	7	7	100
VI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	Kontak dagang	2	2	100
13	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	fasilitasi promosi	1	1	100
VII	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	1,3	1,19	91,5
14	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera Ulang	Alat UTTP	112	111	99,1
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	orang	80	50	62,5
		Jumlah alat UTTP yang didata	Alat UTTP	6.000	9.317	155,3
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	unit	500	650	130

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
15	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	Informasi Harga	640	800	125,0
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	orang	420	420	100,0
VIII	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	%	0	0	100
16	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah Pedangan Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	pedagang rokok	300	300	100
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	%	1,25	-1,05	-184
17	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	unit usaha industri	10	-51	-610
		jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	Unit usaha	0	0	0
		Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	0	0	0
X	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	%	75	75	100
18	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	orang	100	100	100
XI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	%	6,25	10	160
19	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	unit usaha industri	60	40	67
		jumlah dokumen monev pelatihan	dokumen	10	0	0
		jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	unit usaha	15	15	100
		Jumlah Jenis Bahan, peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk pandemic Covid-19 yang tersedia	unit	9	9	100
20	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	15	15	100

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 3 sasaran strategis/ kinerja utama, adapun analisa dari ketiga sasaran strategis/ kinerja utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang pertama ini, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \left\{ \left(\frac{\text{Volume usaha perdagangan tahun } n - \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)}{\text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)} \right) \right\} \times 100 \% \\ &= \left\{ \frac{(627.909.636.000 - 985.762.612.000)}{985.762.612.000} \right\} \times 100 \% \\ &= -36,3 \% \text{ (Sumber data : Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar)} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar -36,3 %, sehingga persentase capaiannya sebesar -2.520 % dengan kategori **tidak berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,5 % dengan realisasi sebesar -36,3 %. Menurunnya volume usaha perdagangan tahun ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. **Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan**, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan sub kegiatan :
 - Updating Pendataan PKL
 - Seminar gerakan PKL dan Asongan Blitar taat aturan
 - Pembinaan PKL dan asongan
 - Pengadaan rombongan untuk PKL
 - b. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan, dengan sub kegiatan :
 - Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan
 - Fasilitasi Pembinaan Ekspor Impor
 - Pendataan Pelaku Usaha Perdagangan

Program Pengembangan Pasar Tradisional, dengan kegiatan:

a. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional, dengan sub kegiatan :

- Pengecatan Pasar
- Pengadaan speaker untuk Pasar Pon
- Pengadaan Sound System Pasar Pusat Kuliner
- Pembangunan Tempat Parkir dan Atap Gantangan Ps. Burung Dimoro
- Pembangunan Mushola Toilet dan Pos Keamanan Pasar Karang Tengah
- Pembuatan Mushola dan Pos Keamanan Pasar Pusat kuliner
- Pembangunan Saluran Air Pasar Pon
- Pembangunan Kanopi dan Pagar Pengamanan Pasar Legi
- Pengadaan Spot Selfie dan Tempat Bermain Anak Pasar Pon
- Pembangunan Pagar Pasar Dimoro
- Pemasangan meter listrik Pasar Pusat Kuliner dan Sentra PKL
- Pengadaan Pohon Peneduh Pasar Dimoro

2. **Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan,** dengan Kegiatan :

- a. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Bidang Perdagangan, dengan sub kegiatan :
- Pameran Produk Khas Kota Blitar

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tanpa terkecuali Indonesia dan khususnya Kota Blitar, yang mempengaruhi seluruh lini perekonomian.
- b. Belum tersedianya tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum.
- c. Semakin berkembangnya perdagangan mikro di Kota Blitar khususnya Pedagang Kaki Lima yang berdasarkan Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2018, ada 43 ruas jalan yang diperbolehkan untuk berjualan, kedepannya perlu dikaji apakah dibutuhkan penambahan ruas jalan, atau ruas jalan yang diperbolehkan sekarang masih layak untuk dijadikan tempat usaha perdagangan.

- d. Semakin mudah dan murah nya ongkos kirim barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia, membuat persaingan perdagangan semakin kompetitif dan berdampak terhadap pelaku usaha di Kota Blitar
- e. Lemahnya validasi data gudang yang ada di Kota Blitar
- f. Belum maksimalnya pembangunan Pasar Legi

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Melakukan kajian tentang ruas jalan dan luas usaha perdagangan yang diperbolehkan di Kota Blitar
- c. Mengadakan pembinaan ekspor impor bagi pelaku usaha perdagangan
- d. Pembangunan pasar Legi tahap ke-2

II. Meningkatnya Pengawasan Perdagangan

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang kedua ini, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \left\{ \left(\text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } n - \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1) \right) / \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1) \right\} \times 100 \% = \\ &= (1.993 - 1.902) / 1.902 \times 100 \% \\ &= 4,78 \% \text{ (Sumber data : Disdagin Tahun 2020)} \end{aligned}$$

dari hasil perhitungan, persentase peningkatan pengawasan perdagangan sebesar 4,78 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 95,6 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 5 % dengan realisasi sebesar 4,78 %.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase alat UTTP bertanda tera sah, yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Operasionalisasi dan Pengaturan Pengembangan Kemetrolgian Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Sosialisasi BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus
 - Sosialisasi metrologi bagi wajib tera/ pemilik alat UTTP

- Pengawasan BDKT
 - Pengawasan Alat UTTP
 - Pelayanan tera/tera ulang
 - Pendataan pemilik UTTP wilayah Kota Blitar
 - Pengadaan peralatan Metrologi
- b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Kebutuhan Pokok, Penting dan Minuman Beralkohol, dengan sub kegiatan :
- Sosialisasi Bahaya Minuman Beralkohol bagi Masyarakat
 - Monitoring harga sembako dan stok bahan pokok secara rutin
 - Siaran radio Adlips harga sembako

2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Program ini didukung kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, substansi kegiatannya adalah melakukan pengumpulan informasi rokok yang dilekati pita cukai palsu dari pedagang rokok di seluruh wilayah Kota Blitar.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, terlihat dari pencapaian target yang masuk kategori tidak berhasil, hal ini dikarenakan beberapa masalah antara lain :

- a. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri, karena terkendala cap tanda tera yang baru keluar akhir tahun 2020 dan alat standard yang perlu dikalibrasi agar pelayanan sah dilakukan menurut aturan.
- b. Di Kemetrolgian, dibutuhkan penambahan Ruang Lingkup khususnya untuk Timbangan Jembatan

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Penganggaran kalibrasi alat standard di Tahun 2021
- b. Pengadaan alat standard bidur untuk memenuhi syarat penambahan ruang lingkup dan pengikutsertaan penera dalam Diklat Teknis Timbangan Jembatan sebagai syarat pelayanan tera.

III. Meningkatnya Produktivitas Industri

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang ketiga ini, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned}
 \text{formulasi} &= \{(\text{Nilai produksi industri tahun } n - \text{Nilai produksi} \\
 &\quad \text{industri tahun } (n-1)) / \text{Nilai produksi industri tahun } (n- \\
 &\quad 1)\} \times 100 \% \\
 &= \{(739.771.197 - 772.131.687,0) / 739.771.197\} \times 100 \% \\
 &= -4,19 \% \text{ (Sumber data : Disdagin Tahun 2020)}
 \end{aligned}$$

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan nilai produksi industri sebesar -4,19 %, sehingga persentase capaiannya sebesar -1.147,5 % dengan kategori **tidak berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 0,4 % dengan realisasi sebesar -4,19 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, dengan sub kegiatan :
 - Pelatihan teknik dasar batik; dilaksanakan selama 7 hari dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, sebanyak 2 kali dengan peserta yang berbeda
 - Validasi data IKM Kota Blitar Tahun 2020
- b. Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat bidang Perindustrian, dengan sub kegiatan :
 - Bazar Batik dan Aksesoris Daerah, bertempat di Jalan Kenanga Kota Blitar, dengan peserta sebanyak 80 pelaku usaha industri;
 - Bazar Kerajinan Daerah, bertempat di Jalan Kenanga Kota Blitar, dengan peserta sebanyak 80 pelaku usaha industri;
 - Bazar Makanan dan Minuman Daerah, bertempat di Jalan Kenanga Kota Blitar, dengan peserta sebanyak 80 pelaku usaha industri;

2. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

Program ini didukung oleh Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah Melalui Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin bagi IKM, dan Penerapan Good Manufacturing Practise bagi IHT , dengan sub Kegiatan :

- Uji tar dan nikotin rokok yang beredar di Kota Blitar

- Sosialisasi penerapan *Good Manufacturing Practices* kepada Industri Hasil Tembakau.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi
- b. Pelaku IKM masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri
- b. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam even pameran/ promosi produk

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2020

Tabel. III.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realiasi Tahun 2020
1	2		3	4	4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	1,25 %	7,5 %	1,5 %	-36.3 %
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	5 %	6,4 %	5 %	4.78 %
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	0,35 %	4,4 %	0,4 %	-4.19 %

Dapat dilihat untuk IKU pertama dan ketiga mengalami penurunan, yaitu peningkatan volume perdagangan dan peningkatan produktivitas industri. Hal ini dikarenakan pandemic Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia, khususnya Kota Blitar, yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di segala lini. IKU kedua pun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu, hal ini juga dikarenakan

terbatasnya kegiatan yang dilakukan serta adanya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tabel. III.6. Perbandingan realisasi kinerja IKU 2020 dengan target akhir renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA 2016-2021 (%)	CAPAIAN TAHUN 2020 THD TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	2	5	6	7
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	8,3 %	1,75 %	474,3 %
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	11,21	10 %	112,1 %
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	13,09 %	0,45 %	2.908,9 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, ketiga IKU pada tahun 2020, memberi capaian yang signifikan terhadap target akhir Renstra 2016-2021, yaitu berturut-turut sebesar 474,3 % ; 112,1 % ; dan 2.908,9 %. tidak dipungkiri, besarnya persentase capaian kinerja IKU dikarenakan kurangnya data awal yang dimiliki PD, sehingga dalam penentuan target tahunan ataupun target akhir RENSTRA terlalu kecil.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2020 melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 11 (sebelas) program dan 20 (dua puluh) kegiatan serta mengelola anggaran sebesar Rp. 15.147.600.323,- dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti tabel di bawah ini :

Tabel III.7. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	5.576.747.154	4.976.602.396	89,24
2.	Belanja Langsung	9.570.853.169	8.422.795.643	88,0
	Jumlah	15.147.600.323	13.399.398.039	88,46

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini

Tabel III.8. Realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	3.072.579.069	2.642.717.381	86
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	106.659.500	106.656.900	99,99
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	81.416.361	69.354.089	85,18
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	1.852.949.708	1.454.705.884,6	78,51
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	1.017.240.500	997.687.507	98,08
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	8.013.000	8.013.000	100
6	Penyusunan Laporan Keuangan	6.300.000	6.300.000	100
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	62.045.600	61.756.570	99,53
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	40.647.600	40.362.570	99,30
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	21.398.000	21.394.000	99,98
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.250.000	5.250.000	100
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.250.000	5.250.000	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	1.411.946.900	1.326.120.936	93,92
10	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.029.790.000	979.116.236	95,08
11	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	382.156.900	347.004.700	90,80
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	2.615.666.600	2.502.147.935	95,66
12	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	2.615.666.600	2.502.147.935	95,66
VI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	62.789.200	62.784.200	99,99
13	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	62.789.200	62.784.200	99,99
VII	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	1.259.343.200	1.052.755.600	83,6
14	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	1.052.814.300	881.706.100	83,7
15	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	206.528.900	171.049.500	82,8
VIII	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	30.000.000	25.334.000	84,4
16	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	30.000.000	25.334.000	84,4
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	10.005.400	1.429.400	14,3
17	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	10.005.400	1.429.400	14,3
X	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	75.000.000	57.929.000	77,24

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
18	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	75.000.000	57.929.000	77,24
XI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	966.227.200	684.570.621	70,8
19	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	692.174.400	585.878.521	84,64
20	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	274.052.800	98.692.100	36,01

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel III.9. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	4.090.402.700	42,74
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	1.289.343.200	13,47
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	1.051.232.600	10,98
JUMLAH		6.430.978.500	67,19

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel III.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	1,5	-36.3	-2.520	4.090.402.700	3.891.053.071	95,12

Program 1.1 Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	5	4,44	85	1.411.946.900	1.326.120.936	93,92
Program 1.2 Pengembangan Pasar Tradisional	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	65	67	103	2.615.666.600	2.502.147.935	95,66
Program 1.3 Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perdagangan	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	2	2	100	62.789.200	62.784.200	99,99
Sasaran 2 Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	5	4.78	95.6	1.289.343.200	1.078.089.600	83,62 %
Program 2.1 Pengawasan Dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	1,3	1,19	91,5	1.259.343.200	1.052.755.600	83,6
Program 2.2 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	0 %	0 %	100 %	30.000.000	25.334.000	84,4
Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	0,4	-4.19	-1.147,5	1.051.232.600	743.939.021	70,77
Program 3.1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	1,25	-1,05	-84	10.005.400	1.429.400	14,3
Program 3.2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perindustrian	Persentase Industri Kecil Terlatih	6,25	10	160	966.227.200	684.570.621	70,8

Program 3.3							
Program Pembinaan Industri (Dbhcht)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	75 %	75 %	100 %	75.000.000	57.929.000	77,24

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	-2.520	95,12	-27,49
Meningkatnya pengawasan Perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	95.6	83,62	1,14
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	-1.147,5	70,77	-17,21

C. Prestasi/ Penghargaan

Prestasi atau penghargaan yang pernah diraih Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada tahun 2019, antara lain :

1. Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2020 dengan kategori A (memuaskan) dan menduduki peringkat ke-5 dari 29 OPD yang ada di Pemerintah Kota Blitar

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor perdagangan dan industri telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya. namun tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- k. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tanpa terkecuali Indonesia dan khususnya Kota Blitar, yang mempengaruhi seluruh lini perekonomian.
- l. Belum tersedianya tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum.
- m. Semakin berkembangnya perdagangan mikro di Kota Blitar khususnya Pedagang Kaki Lima yang berdasarkan Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2018, ada 43 ruas jalan yang diperbolehkan untuk berjualan, kedepannya perlu dikaji apakah dibutuhkan penambahan ruas jalan, atau ruas jalan yang diperbolehkan sekarang masih layak untuk dijadikan tempat usaha perdagangan.
- n. Semakin mudah dan murah ongkos kirim barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia, membuat persaingan perdagangan semakin kompetitif dan berdampak terhadap pelaku usaha di Kota Blitar
- o. Lemahnya validasi data gudang yang ada di Kota Blitar
- p. Belum maksimalnya pembangunan Pasar Legi
- q. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri, karena terkendala cap tanda tera yang baru keluar akhir tahun 2020 dan alat standard yang perlu dikalibrasi agar pelayanan sah dilakukan menurut aturan.
- r. Di Kemetrolagian, dibutuhkan penambahan Ruang Lingkup khususnya untuk Timbangan Jembatan

- s. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi
- t. Pelaku IKM masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- j. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- k. Melakukan kajian tentang ruas jalan dan luas usaha perdagangan yang diperbolehkan di Kota Blitar
- l. Mengadakan pembinaan ekspor impor bagi pelaku usaha perdagangan
- m. Digitalisasi pendataan gudang
- n. Pembangunan pasar Legi tahap ke-2
- o. Penganggaran kalibrasi alat standard di Tahun 2021
- p. Pengadaan alat standard bidur untuk memenuhi syarat penambahan ruang lingkup dan pengikutsertaan penera dalam Diklat Teknis Timbangan Jembatan sebagai syarat pelayanan tera.
- q. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri
- r. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam even pameran/ promosi produk

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar serta dapat mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 9 Februari 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



ARIANTO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR
TAHUN 2016-2021**

TUJUAN										SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					KEBIJAKAN		PROGRAM
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\{(\text{nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - \text{nilai PDRB sektor Perdagangan tahun } (n-1)) / \text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	11,66 %	12,9 %	11 %	11,2 %	11,3 %	11,4 %	11,5 %	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\{ (\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{volume usaha tahun } (n-1)) / \text{volume usaha tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	-	-	-	-	1,25 %	1,5 %	1,75 %	Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan	
																			Revitalisasi pasar tradisional	Program Pengembangan Pasar Tradisional		
																			Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna menciptakan penataan dan penertiban para pelaku usaha kecil dan menengah	Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan		
										Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	$\{ (\text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } n - \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1)) / \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP,}$	-	-	-	-	5 %	7,5 %	10 %	Meningkatkan pengawasan perdagangan yang lebih menitik beratkan pada pengawasan alat Ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus	Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	

												BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)) x 100 %								(BDKT), Minuman Beralkohol	
																				Pengawasan dan pengumpulan informasi Hasil Tembakau yang dilekati pita cukai palsu	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	{{nilai PDRB Sektor Industri tahun n - nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1)}/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1)} x 100 %	12,39 %	9,92 %	11,5 %	11,55 %	11,6 %	11,65 %	11,7 %	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi Industri	{{Jumlah nilai produksi ndustry tahun n – Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1)}/ Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1)} x 100 %	-	-	0,25 %	0,3%	0,35 %	0,4%	0,45 %	Mengembangkan sektor industri yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumber daya lokal yang ada sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat	- Program Pengembangan Industri Kecil Menengah - Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian - Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	1,5 %	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	5%	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	100	unit usaha	1.029.790.000
							Jumlah PKL yang didata	500	unit usaha	
						Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	300	pedagan g	382.156.900
							Jumlah usaha perdagangan yang didata	2.000	unit usaha	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	65 %	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	7	unit	2.615.666.600
			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	2 Kontak Dagang	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	1	fasilitasi promosi	62.789.200
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	5 %	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN	Persentase Alat UTP yang ditera/tera ulang	1,3 %	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTP yang ditera/ tera Ulang	112	Alat UTP	1.052.814.300

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PERDAGANGAN						
							Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	80 orang	
							Jumlah alat UTP yang didata	6.000 Alat UTP	
							Jumlah UTP dan BDKT yang diawasi	500 unit	
						Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	640 Informasi Harga	206.528.900
							Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	420 orang	
			PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	0 %	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah Pedangan Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	300 pedagang rokok	30.000.000
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	0,4 %	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	1,25 %	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	10 unit usaha industri	10.005.400

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	75 %	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi IKM, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	100 orang	75.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	6,25 %	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	60 unit usaha industri	692.174.400
							jumlah dokumen monev pelatihan	10 dokumen	
							jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	15 unit usaha	
							Jumlah Jenis Bahan, peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk pandemi Covid-19 yang tersedia	9 unit	
						Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	25 Pengunjung	274.052.800

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\{(\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{volume usaha tahun } (n-1)) / \text{volume usaha tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	1,5 %	-36.3	-2.520		Program Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan	1.411.946.900	1.326.120.936	93,92	
								Program Pengembangan Pasar Tradisional	2.615.666.600	2.502.147.935	95,66	
								Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perdagangan	62.789.200	62.784.200	99,99	
	Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	$\{ (\text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } n - \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1)) / \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP,$	5 %	4.78	95.6		Program Pengawasan Dan Pengamanan Perdagangan	1.259.343.200	1.052.755.600	83,6	
			$\text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1)) / \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP,$					Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)	30.000.000	25.334.000	84,4	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)) x 100 %									
	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	{{(Jumlah nilai produksi Industry tahun n – Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1))/ Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1)} x 100 %	0,4 %	-4.19	- 1.147,5		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	10.005.400	1.429.400	14,3	
								Program Pembinaan Industri (Dbhcht)	75.000.000	57.929.000	77,24	
								Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perindustrian	966.227.200	684.570.621	70,8	